

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Tahun 2025

PT. Tempo Utama Finance

DAFTAR ISI

1.	Strategi keberlanjutan	1
2.	Ikhtisar aspek keberlanjutan 2022-2024	
2.1.	Aspek ekonomi	4
2.2.	Aspek sosial	4
2.3.	Aspek lingkungan hidup	4
3.	Profil Perusahaan	
3.1.	Visi misi berkelanjutan	5
3.2.	Sekilas Perusahaan	6
3.3.	Skala organisasi	6
3.4.	Kegiatan usaha dan produk/jasa pembiayaan	7
3.5.	Keanggotaan dalam Asosiasi & Lembaga	7
4.	Penjelasan Direksi	
4.1.	Kebijakan untuk merespon tantangan pemenuhan strategi keberkelanjutan	8
4.2.	Penerapan keuangan berkelanjutan	9
4.3.	Strategi pencapaian target	10
5.	Tata kelola berkelanjutan	
5.1.	Tugas dan tanggung jawab penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan	11
5.2.	Pengembangan kompetensi	12
5.3.	Penjelasan manajemen risiko dalam penerapan keuangan berkelanjutan	13
5.4.	Pendekatan pemangku kepentingan	15
5.5.	Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan	16
6.	Kinerja berkelanjutan	
6.1.	Membangun budaya berkelanjutan	17
6.2.	Kinerja aspek ekonomi	17
6.3.	Kinerja aspek sosial	18
6.4.	Kinerja aspek lingkungan hidup	21
7.	Referensi Peraturan OJK	23

1. Strategi keberlanjutan

Sepanjang tahun 2025, risiko ketidakpastian masih tinggi seiring dengan meningkatnya dinamika geopolitik global seperti konflik yang terjadi di beberapa kawasan rawan konflik, kebijakan resiprokal tarif yang dikenakan oleh pemerintahan Presiden Trump kepada beberapa negara, termasuk Indonesia, masih berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat (“AS”) dengan Republik Rakyat Tiongkok (“RRT”) dan berbagai dinamika geopolitik ekonomi lainnya. Ketegangan dan dinamika ini sangat mempengaruhi perekonomian global. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi global yang dipicu oleh penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara ekonomi maju dan RRT. Sebagai salah satu negara yang mempunyai kontribusi besar dalam perdagangan internasional, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi RRT akan berpengaruh besar pada perdagangan global termasuk Indonesia.

Berbagai kebijakan fiskal dan moneter telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (“BI”) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tetap bertumbuh ditengah tingginya ketidakpastian dan memanasnya perang tarif dan geopolitik dunia. Hasilnya menunjukkan kondisi ekonomi nasional dapat bertahan secara stabil ditengah kondisi ketidakpastian tersebut. Biro Pusat Statistik (“BPS”) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 mencapai 5,11% *yoy* atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang mencapai 5,03%. Capaian pertumbuhan ini masih dianggap baik dan relatif stabil mengingat tren penurunan pertumbuhan ekonomi pada negara-negara maju, termasuk RRT. Pertumbuhan ekonomi nasional ini ditopang kuat oleh belanja masyarakat, ekspor, dan investasi. Pemerintah dan BI beserta seluruh pihak terkait terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas dan mempunyai daya saing sebagai modal untuk menghadapi risiko dan tantangan dari dinamika ekonomi dan geopolitik global.

Ditengah stabilnya proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025, pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan mengalami sedikit perlambatan. Data Statistik Lembaga Pembiayaan (“SLP”) dari OJK per Desember 2025 menunjukkan beberapa ringkasan realisasi beberapa indikator keuangan dibanding realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Realisasi total aset sebesar Rp. 588.882 Miliar atau turun 0,01% *yoy*;
- Realisasi piutang pembiayaan (neto) mencapai jumlah sebesar Rp. 506.501 Milyar atau naik 0,61% *yoy*;
- Realisasi laba setelah pajak sebesar Rp. 18.449 Miliar atau turun 18,07% *yoy*;

- NPF Net sebesar 2,51% atau turun 0,19% dibanding posisi Desember 2024

Tendensi melambatnya pertumbuhan piutang pembiayaan dibandingkan tahun 2024 disebabkan karena melambatnya penjualan industri otomotif, khususnya penjualan kendaraan bermotor baru baik kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua. Industri otomotif masih menjadi kontributor penyaluran pembiayaan di industri perusahaan pembiayaan. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat juga berdampak pada penundaan keputusan membeli dan mengambil kredit kendaraan bermotor baru. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi pertumbuhan piutang pembiayaan di industri perusahaan pembiayaan.

Mempertimbangkan perkembangan ekonomi nasional dan kondisi pasar industri pembiayaan tersebut, PT. Tempo Utama Finance (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menetapkan strategi untuk fokus meningkatkan piutang pembiayaan melalui pembiayaan keperluan produktif target pasar badan usaha/perusahaan pada sektor ekonomi yang aman, telah dilayani dan dipahami dengan baik. Untuk memperkuat portfolio piutang pembiayaan, Perusahaan juga menetapkan strategi peningkatan piutang pembiayaan melalui penyaluran pembiayaan keperluan konsumtif dengan target pasar perorangan, termasuk melakukan pengembangan pembiayaan berbasis digital. Dari pelaksanaan strategi tersebut, maka berikut ini ringkasan realisasi beberapa indikator keuangan pada tahun 2025 dibanding realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Total aset sebesar Rp. 114.746 juta atau naik 1,95% *yoy*
- Piutang pembiayaan (neto) sebesar Rp. 50.687 juta atau turun 13,71% *yoy*
- Laba sebelum pajak sebesar Rp. 625 juta atau turun 49,43% *yoy*
- Kualitas piutang pembiayaan yang ditunjukkan melalui rasio NPF Net masih tetap sebesar 0,00% atau masih sama dengan realisasi tahun lalu

Berdasarkan data diatas dapat disampaikan bahwa Perusahaan juga mengalami perlambatan pertumbuhan, namun masih tetap dapat mempertahankan kualitas piutang pembiayaan dalam kondisi yang optimal.

Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Perusahaan mempunyai komitmen melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup secara seimbang serta melaksanakan tata kelola perusahaan pembiayaan yang baik. Komitmen merupakan salah satu kontribusi Perusahaan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan (“KB”). Melalui visi menjadi

perusahaan pembiayaan yang profesional, inovatif, bertanggung jawab dan amanah dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dan misi menyediakan dan menawarkan produk dan jasa pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat dan memberikan kontribusi menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, Perusahaan senantiasa mewujudkan komitmen tersebut dalam pelaksanaan aktivitas usaha pembiayaan.

Dalam pelaksanaan tersebut, Perusahaan mengacu pada Peraturan OJK (“POJK”) No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Lebih lanjut, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”) tahun 2025 – 2029 yang menjadi panduan bagi seluruh pihak internal Perusahaan dalam melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan. RAKB tahun 2025 mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 dan Lampiran I POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan penerapan KB tersebut tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan strategi untuk mencapai kinerja ekonomi saja namun juga mempertimbangkan pencapaian kinerja sosial dan lingkungan hidup dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan pembiayaan yang baik. Perusahaan menyadari bahwa strategi penerapan KB yang berimbang akan memberikan dampak yang positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 pasal 7, Perusahaan telah menyusun prioritas penerapan KB yang telah dituangkan dalam RAKB tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- (1) Prioritas pertama: pengembangan kapasitas internal Perusahaan
- (2) Prioritas kedua: penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola dan/atau *Standard Operating Procedure* (“SOP”) yang selaras dengan prinsip KB
- (3) Prioritas ketiga: pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk implementasi produk/jasa pembiayaan yang selaras penerapan KB

2. Ikhtisar aspek keberlanjutan tahun 2023 – 2025

2.1. Kinerja aspek ekonomi

Deskripsi (Dalam Rp.Juta)	2025	2024	2023
1 Total aset	114.746	112.550	111.408
2 Piutang pembiayaan (neto)	50.687	58.737	49.053
3 Total pendapatan	6.214	6.819	7.268
4 Laba bersih	625	1.236	2.154
5 Produk/jasa pembiayaan ramah lingkungan	N/A	N/A	N/A
6 Data pelibatan pihak lokal dalam proses terkait penerapan KB	N/A	N/A	N/A

2.2. Kinerja aspek sosial

Deskripsi	2025	2024	2023
1 Komposisi SDM berdasarkan pendidikan (%)	100,00	100,00	100,00
a. Sekolah Menengah	-	-	10,00
b. Diploma 3 (D3)	33,33	30,00	30,00
c. Sarjana Strata 1 (S1)	58,33	70,00	60,00
d. Pasca Sarjana Strata 2 (S2)	8,34	-	-
2 Total pelatihan, seminar dan sertifikasi (kali)	17	19	17
a. Pelatihan/Training	11	9	3
b. Seminar	3	10	14
c. Sertifikasi	3	-	-
3 Rasio SDM terhadap jumlah pelatihan, seminar dan sertifikasi (kali/orang)	1,12	1,58	1,59
4 Program Literasi Keuangan			
a. Jumlah kegiatan literasi keuangan (kali)	2	1	1
b. Metode kegiatan	Offline	Offline	Offline
c. Jumlah peserta (orang)	132	72	35

2.3. Kinerja aspek lingkungan hidup

Deskripsi	2025	2024	2023
1 Total energi listrik (KwH)	10.915	5.876	6.764
2 Total pemakaian kertas (lembar)	77.874	56.943	63.404

3. Profil Perusahaan

Perusahaan (d/h. PT Artha Rahardja Sakti Leasing) didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1983 berdasarkan Akta Nomor 199 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-2004.HT.01.01.TH.84 tanggal 30 Maret 1984 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 tanggal 12 Juni 1984, Tambahan Nomor 578. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 31 Juli 2012 dihadapan Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto Sarjana Hukum, Notaris bertempat di Jakarta, dilakukan seluruh perubahan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan anggaran dasar dimaksud telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-45434.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan telah mengalami perubahan beberapa kali dengan akta terakhir lainnya yang termuat dalam Akta No. 19 tanggal 28 Juli 2020 yang telah dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2020, Nomor: AHU-AH.01.03-0316653.

3.1. Visi Misi Berkelanjutan

Dalam rangka menjalankan komitmen penerapan KB, Perusahaan menyusun dan menetapkan visi misi berkelanjutan sebagai berikut:

Visi:

Menjadi Perusahaan Pembiayaan professional, inovatif, bertanggung jawab dan amanah dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Misi:

Menyediakan dan menawarkan produk dan jasa pembiayaan yang terjangkau masyarakat dan memberikan kontribusi menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

3.2. Sekilas Perusahaan

Berikut ini informasi mengenai Perusahaan:

Nama Perusahaan	PT. Tempo Utama Finance
Alamat Kantor Pusat	Tempo Scan Tower Jl. HR. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan Timur, Jakarta Selatan
Nomer Telepon	(021)29667879
E-mail	tufjkt@thetempogroup.com
Website	https://www.tempoutamafinance.com

3.3. Skala Organisasi

Berikut ini informasi mengenai skala organisasi:

Total aset (Rp.juta)	114.746	
Alamat Kantor Pusat	1 (satu) kantor pusat merangkap kantor operasional di Jakarta. Perusahaan belum memiliki kantor cabang maupun kantor selain kantor cabang di luar kota Jakarta	
Area Operasional	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur & Lampung	
Komposisi karyawan berdasarkan pendidikan (%)	S2	8,34%
	S1	58,33%
	D3	33,33%
	SMA	0,00%
Komposisi karyawan berdasarkan jabatan (%)	Direksi	17,00%
	Manager	25,00%
	Supervisor	25,00%
	Non Staff	33,00%
Komposisi karyawan berdasarkan usia (%)	>50 tahun	25,00%
	41 - 50	33,00%
	31 - 40	25,00%
	21 - 30	17,00%
Komposisi karyawan berdasarkan gender (%)	Pria	50,00%
	Wanita	50,00%
Komposisi kary. berdasarkan status ketenagakerjaan (%)	Tetap	100,00%
	Kontrak	0,00%


3.4. Kegiatan Usaha dan Produk/Jasa Pembiayaan

Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, Perusahaan menawarkan produk/jasa pembiayaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan OJK (“POJK”) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 46 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan Perusahaan Modal Ventura. Berdasarkan regulasi diatas, jenis dan skema pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tipe Pembiayaan	Skema
Pembiayaan Investasi	Sewa Pembiayaan
	Jual dan Sewa-balik
	Anjak piutang dengan pemberian jaminan Penjual piutang
	Anjak piutang tanpa pemberian jaminan Penjual piutang
	Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran
	Pembiayaan proyek
	Pembiayaan Infrastruktur
	Pembiayaan lainnya yang disetujui OJK
Pembiayaan Modal Kerja	Jual dan Sewa-balik
	Anjak piutang dengan pemberian jaminan Penjual piutang
	Anjak piutang tanpa pemberian jaminan Penjual piutang
	Fasilitas modal usaha
	Pembiayaan lainnya yang disetujui OJK
Pembiayaan Multiguna	Sewa Pembiayaan
	Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran
	Fasilitas dana
	Pembiayaan lainnya yang disetujui OJK

3.5. Keanggotaan dalam Asosiasi dan Lembaga

Dalam rangka mendukung kegiatan usaha pembiayaan, Perusahaan telah bergabung dalam Asosiasi dan Lembaga pendukung lainnya yaitu:

Nama Asosiasi/Lembaga	Keterangan
 Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia	- Bergabung sejak tahun 1986 - Posisi sebagai Anggota
 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	- Bergabung sejak tahun 2017 - Posisi sebagai Anggota
 Rapindo Asset Registry	- Bergabung sejak tahun 2023 - Posisi sebagai Anggota

4. Penjelasan Direksi

4.1. Kebijakan untuk merespon tantangan pemenuhan strategi keberlanjutan

Perkembangan dinamika yang memanas pada geopolitik dan ekonomi global telah meningkatkan risiko ketidakpastian yang mempengaruhi perekonomian nasional secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa ekonomi nasional tahun 2025 secara relatif masih tumbuh stabil dibanding negara lain di kawasan.

Meski bertumbuh secara stabil, namun ekonomi nasional masih menghadapi berbagai tantangan antara lain menurunnya daya beli masyarakat dan melambatnya pertumbuhan sektor riil seperti sektor usaha manufaktur dan sektor usaha produktif lainnya. Sektor usaha produktif ini menjadi fokus Perusahaan dalam menyalurkan pembiayaan dengan proses pembiayaan yang selektif agar dapat menjaga kualitas piutang pembiayaan dalam kondisi sehat dan memberikan manfaat yang optimal. Klasifikasi sektor usaha yang terkait penerapan KB masih menjadi tantangan dan harus dapat dikembangkan melalui pelatihan penerapan KB yang berkelanjutan. Namun demikian, berdasarkan Perusahaan

Dalam RAKB tahun 2025, Perusahaan masih untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas/kemampuan pihak internal Perusahaan. Ini masih sejalan dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 dimana terdapat 3 (tiga) prioritas utama yaitu (1) Pengembangan kemampuan internal dan Sumber Daya Manusia (“SDM”); (2) Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau regulasi internal; dan (3) Pengembangan produk/jasa pembiayaan yang terkait keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas internal ini Perusahaan telah melakukan beberapa langkah penting seperti evaluasi regulasi internal, melakukan evaluasi struktur organisasi, mengikuti pelatihan penerapan KB dari institusi yang berkompeten dan dilanjutkan *sharing session* materi pelatihan penerapan KB kepada seluruh SDM Perusahaan dan melanjutkan pengembangan sistem Teknologi Informasi (“TI”) yang mendukung kegiatan operasional.

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan seluruh pihak internal Perusahaan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan secara baik mengenai penerapan KB dan tersedianya infrastruktur organisasi yang memadai agar penerapan KB dapat dilaksanakan secara optimal.

4.2. Penerapan KB

Dalam pelaksanaan aktivitas usaha pembiayaan, Perusahaan telah menetapkan target penyaluran pembiayaan untuk membiayai keperluan produktif pada sektor ekonomi yang telah dilayani dan dipahami dengan baik. Dalam rangka diversifikasi pembiayaan, Perusahaan juga secara bertahap telah menyalurkan pembiayaan untuk keperluan konsumtif/non produktif.

Pada realisasi kinerja ekonomi dapat dilihat bahwa di tengah dinamika pasar yang menantang, Perusahaan tetap menjaga stabilitas posisi keuangan yang tercermin pada pertumbuhan total aset sebesar 1,95%, mencapai Rp. 114.746 juta pada akhir tahun 2025. Pertumbuhan aset ini menjadi fondasi penting bagi Perusahaan dalam mengelola keberlanjutan bisnis jangka panjang. Pada periode yang sama, piutang pembiayaan (neto) tercatat sebesar Rp. 50.687 juta. Penurunan sebesar 13,70% ini terutama disebabkan oleh penurunan pembiayaan produktif. Kondisi tersebut berdampak secara proporsional terhadap total pendapatan yang tercatat sebesar Rp. 6.214 juta serta laba bersih sebesar Rp. 625 juta. Penurunan rentabilitas ini merupakan refleksi dari sikap kehati-hatian Perusahaan dalam penyaluran pembiayaan guna menjaga kualitas aset di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Meskipun terjadi kontraksi pada laba bersih, Perusahaan tetap berkomitmen untuk melakukan efisiensi operasional dan penguatan strategi manajemen risiko agar tetap memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, sejalan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* ("SDG") No. 8 mengenai Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."

Pada realisasi kinerja aspek sosial, Perusahaan berkomitmen penuh terhadap pengembangan kualitas SDM dan penguatan literasi keuangan masyarakat. Realisasi komposisi SDM kami di tahun 2025 tetap stabil dengan profil tenaga kerja yang didominasi oleh lulusan jenjang pendidikan Strata-1 ("S1"), yang mencerminkan basis kompetensi profesional yang kuat.

Di bidang pengembangan kapasitas, Perusahaan telah merealisasikan 17 (tujuh belas) kegiatan pelatihan, seminar, dan sertifikasi sepanjang tahun 2025. Meskipun secara frekuensi terdapat penyesuaian sebesar 10,53% dibandingkan tahun sebelumnya, program pengembangan tahun ini lebih difokuskan pada aspek kualitas dan relevansi yang disesuaikan secara tajam dengan kebutuhan strategis Perusahaan. Upaya ini merupakan

perwujudan dukungan kami terhadap SDG No. 4 mengenai Pendidikan Berkualitas.

Sebagai bentuk tanggung jawab eksternal, Perusahaan secara aktif berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Literasi Keuangan (LK). Pada tahun 2025, kami telah melaksanakan dua kegiatan edukasi tatap muka bagi 132 (seratus tiga puluh dua) partisipan, yang terdiri dari siswa/wi Sekolah Menengah Atas (“SMA”) Bintara dan mahasiswa/wi Politeknik Negeri Jakarta. Melalui tema 'Menjadi Konsumen yang Cerdas dalam Memanfaatkan Fasilitas Dana Pembiayaan', Perusahaan berupaya membekali generasi muda dengan pengetahuan finansial yang aman dan terencana. Inisiatif ini merupakan langkah nyata dalam mendukung SDG No. 10 mengenai Berkurangnya Kesenjangan, dengan memperluas akses informasi keuangan yang inklusif bagi masyarakat."

Pada realisasi kinerja aspek lingkungan hidup, Perusahaan senantiasa memantau penggunaan energi listrik dan material kertas yang menjadi penopang utama operasional kantor pusat. Sepanjang tahun 2025, konsumsi energi listrik tercatat sebesar 10.915 *Kilowatt/Hour* (KwH), atau mengalami penyesuaian sebesar 85,76% dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh langkah penataan dan optimalisasi ruang kerja di lantai yang baru guna mendukung ekspansi kapasitas operasional.

Sementara itu, penggunaan kertas tercatat sebanyak 77.874 lembar, naik 36,76% sejalan dengan pertumbuhan portofolio dan diversifikasi pembiayaan konsumtif yang berdampak pada peningkatan volume administrasi dokumen kontrak.

Perusahaan menyadari pentingnya efisiensi sumber daya ini. Oleh karena itu, kami tetap berkomitmen penuh untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, termasuk rencana penerapan zonasi pencahayaan dan penguatan sistem digitalisasi. Inisiatif ini merupakan wujud kontribusi nyata Perusahaan dalam mendukung upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (“GRK”) serta selaras dengan komitmen global dalam *Paris Agreement* dan SDG No. 12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab."

4.3. Strategi pencapaian target

Perkembangan dan dinamika yang terjadi pada tatanan global dan dampaknya pada tingkat regional dan domestik perlu diwaspadai. Menimbang hal ini, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan rencana kegiatan usaha pembiayaan yang disesuaikan dengan kapasitas dan

kompetensinya agar tetap dapat menjaga kualitas piutang pembiayaan dalam kondisi yang sehat. Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa Perusahaan fokus pada pasar badan usaha/perusahaan untuk membiayai keperluan produktif pada beberapa sektor ekonomi potensial yang sudah dijalankan dan dipahami dengan baik. Penyaluran pembiayaan untuk keperluan konsumtif/non produktif juga akan ditingkatkan melalui pengembangan produk pembiayaan berbasis digital.

Penerapan tata kelola perusahaan pembiayaan yang baik yang sudah dijalankan akan dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya dengan melalui pengembangan sistem TI yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas Perusahaan. Proses pengkinian regulasi internal dilakukan secara paralel dan disesuaikan dengan pengembangan sistem TI. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM juga tetap menjadi prioritas dimana komitmen Perusahaan untuk memberikan berbagai pelatihan, seminar dan sertifikasi sesuai kebutuhan dari Lembaga/Institusi yang berkompeten.

Dalam hal penggunaan energi listrik, Perusahaan akan melakukan perbaikan melalui zonasi pengaturan lampu penerang ruangan dan melanjutkan pola kerja hemat listrik. Sedangkan penghematan penggunaan kertas melalui edukasi dan himbauan kepada karyawan mengenai penghematan pemakaian kertas dalam kegiatan operasional. Upaya penghematan ini perlu terus dilakukan sebagai kontribusi dalam penurunan emisi GRK dari kegiatan usaha yang dilakukan.

5. Tata Kelola Berkelanjutan

5.1. Tugas dan tanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan

Penerapan tata kelola berkelanjutan berdasarkan POJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Perusahaan telah menyusun dan menetapkan struktur tata kelola berkelanjutan yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan masing-masing Satuan Kerja. Infrastruktur tata kelola berkelanjutan adalah regulasi internal, sistem informasi dan fungsi/tugas pokok masing-masing Satuan Kerja dalam struktur organisasi.

Dewan Komisaris sebagai salah satu organ tata kelola berkelanjutan menjalankan fungsi pengawasan dan juga sebagai penasihat yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha pembiayaan yang dilaksanakan Direksi telah sesuai dengan tujuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga merupakan organ tata kelola berkelanjutan yang menjalankan fungsi

representasi dan manajerial yang memegang peran utama dalam kegiatan operasional Perusahaan. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan strategi dan inisiatif jangka pendek maupun jangka panjang dapat dijalankan dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Direksi didukung oleh Satuan Kerja yang bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya.

Dalam penerapan KB, Perusahaan menyusun dan menetapkan RAKB tahun 2025-2029. Fungsi dan peran supervisi/ pengawasan terhadap pelaksanaan RAKB tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi. Dan Direksi juga menetapkan dan menugaskan Satuan Kerja Pemasaran sebagai Satuan Kerja pelaksana penerapan KB dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyusun RAKB;
- 2) Melaksanakan program penerapan RAKB;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja lainnya terkait pelaksanaan RAKB dan penyusunan Laporan Berkelanjutan;
- 4) Menyusun Laporan Keberlanjutan;
- 5) Bertanggung jawab kepada Direksi atas penerapan RAKB;

Tugas dan tanggung jawab fungsi Kepatuhan dalam tata kelola berkelanjutan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Satuan Kerja lainnya terkait penyusunan dan atau pengkinian regulasi internal seperti pedoman dan SOP termasuk juga koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan Laporan Berkelanjutan. Fungsi Kepatuhan juga memberikan rekomendasi terkait aspek kepatuhan terhadap penerapan KB. Sedangkan Internal Audit sebagai pihak yang independen dalam organisasi Perusahaan berfungsi melakukan evaluasi dan penilaian mengenai kegiatan operasional terhadap prinsip penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan manajemen risiko melalui pendekatan yang sistematis sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan juga sekaligus memperbaiki operasional Perusahaan.

5.2. Pengembangan kompetensi

Komitmen Perusahaan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM sepanjang tahun 2025 telah dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (“APPI”), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) dan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang berkompeten dengan berbagai topik yang dapat mendukung penerapan KB dengan perincian sebagai berikut:

No	Topik	Jenis kegiatan	Jumlah kegiatan	Peserta kegiatan
1	Outlook tahun 2026	Seminar	2	1
2	Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan	Seminar	1	1
3	Sertifikasi Junior Cyber Security	Sertifikasi	1	1
4	Sertifikasi Dasar Pembiayaan	Sertifikasi	1	2
5	Sertifikasi Ahli Pembiayaan	Sertifikasi	1	1
6	Keuangan Berkelanjutan (KB)	Pelatihan	2	1
7	Manajemen Risiko	Pelatihan	1	2
8	Credit rating and Scoring	Pelatihan	1	2
9	Analisa Kredit Modal Kerja & Investasi	Pelatihan	1	3
10	Perlindungan Konsumen sektor keuangan	Pelatihan	1	1
11	Strategi Anti Fraud	Pelatihan	1	1
12	APU PPT dan PPPSPM	Pelatihan	2	1
13	Sosialisasi SIPEDULI	Pelatihan	1	1
14	Sosialisasi SIPESAT	Pelatihan	1	1
Total			17	19

5.3. Penjelasan manajemen risiko dalam penerapan KB

Penerapan KB dengan menerapkan manajemen risiko berdasarkan POJK No. 42 tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya meliputi penerapan 4 (Empat) pilar manajemen risiko yaitu:

- 1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko;
- 4) Sistem pengendalian internal.

Perusahaan telah menyusun dan menetapkan struktur tata kelola dengan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan penugasan kepada Satuan Kerja Pemasaran sebagai pelaksana penerapan KB. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas potensi risiko yang akan dihadapi dalam penerapan KB juga dilakukan. Pengkinian regulasi internal seiring dengan dikeluarkannya regulasi baru dari Regulator. Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, Perusahaan telah menetapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* terhadap pasar yang menjadi target penyaluran pembiayaan. Dalam pelaksanaan proses bisnis terdapat segregasi/pembagian tugas yang memadai mulai dari proses permohonan pembiayaan, keputusan pembiayaan dan pemantauan kualitas piutang pembiayaan.

Penerapan *1st Line of Defense* dalam sistem pengendalian internal pada masing-masing Satuan Kerja telah didukung dengan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai *2nd Line of Defense* yang menjadi mitra kerja bagi Satuan Kerja terkait dalam melakukan pemantauan risiko. Fungsi Internal Audit sebagai *3rd Line of Defense* juga telah berjalan untuk memastikan seluruh regulasi internal telah diterapkan dan dilaksanakan secara baik dan benar oleh seluruh pihak dalam internal Perusahaan dan juga sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan.

Terkait pengendalian *fraud* dan strategi *anti fraud*, Perusahaan mengacu pada POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, khususnya pada Bab XII mengenai pengendalian *fraud* dan strategi *anti fraud*. Perusahaan telah membentuk Unit Kerja Anti Fraud (“UKAF”) sebagai salah satu upaya preventif aktif untuk mengendalikan/mengurangi potensi kejadian *fraud* dalam kegiatan operasional Perusahaan termasuk juga penyusunan Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* dan Pengendalian *Fraud* (“P2SAF”) yang menjadi petunjuk pelaksanaan & tindakan dalam pengendalian *fraud* melalui serangkaian proses kegiatan yang dikenal sebagai Catur Pilar Strategi Anti Fraud (“CPSAF”) yang mencakup kegiatan:

- 1) pencegahan;
- 2) pendeteksian;
- 3) investigasi /pelaporan & sanksi;
- 4) pemantauan /evaluasi & tindak lanjut.

Perusahaan telah menyiapkan saluran *whistleblowing* melalui nomer *Whatsapps* (“WA”) khusus dan alamat *e-mail* sebagai saluran untuk menyampaikan informasi mengenai kejadian *fraud* yang terjadi dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Berdasarkan data dari UKAF, sepanjang tahun 2025 tidak terdapat kasus atau kejadian *fraud* yang terjadi dan tidak ada kasus/kejadian *fraud* yang belum diselesaikan.

Perusahaan telah memiliki Satuan Kerja Layanan Pengaduan Debitur (“LPD”) sebagai bentuk komitmen untuk menangani pengaduan yang diterima dari Debitur. Pelaksanaan penanganan pengaduan debitur ini berdasarkan POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Satuan Kerja LPD mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan penyelesaian yang adil atas pengaduan yang disampaikan Debitur dan sekaligus juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak Debitur. Dan sebagai pedoman pelaksanaan LPD, Perusahaan telah menyusun mekanisme penerimaan, penanganan dan penyelesaian pengaduan Debitur. Berdasarkan data dari Satuan Kerja LPD, sepanjang tahun 2025, Perusahaan belum menerima pengaduan dari Debitur dan tidak ada sisa pengaduan Debitur yang belum terselesaikan.

5.4. Pendekatan pemangku kepentingan

Berikut ini pemetaan dan identifikasi keterlibatan pemangku kepentingan sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan	Topik	Metode Pelibatan	Frekwensi Pendekatan	Respon Perusahaan
Calon debitur/ Debitur	Sosialisasi produk/jasa pembiayaan yang jelas dan transparan	Kantor Pusat, Telepon, <i>E-mail</i> dan <i>Website</i>	Jam operasional, alamat e-mail dan akses <i>website</i>	Menyampaikan informasi produk/jasa pembiayaan
	Penjelasan mengenai produk/jasa pembiayaan yang diperoleh	Ringkasan Informasi Produk & Layanan ("RIPLAY") di <i>website</i> , penyampaian secara tatap muka saat survey, Perjanjian Pembiayaan dan <i>Welcoming Letter</i>	Akses <i>website</i> , proses survey dan saat persetujuan pembiayaan	Menyampaikan informasi detail mengenai produk/jasa pembiayaan yang diperoleh
	Kemudahan akses	Telepon, <i>E-mail</i> , saluran <i>Customer Service</i> dan peran Satuan Kerja Pemasaran	Jam operasional, alamat e-mail dan akses <i>website</i>	Menerima dan menindak lanjuti permintaan informasi dari Calon debitur/Debitur
	Layanan Pengaduan Debitur ("LPD")	Telepon dan <i>E-mail</i> PIC Satuan Kerja LPD	Jam operasional	Menerima dan menindak lanjuti permintaan informasi pengaduan dari Debitur
Pemegang Saham	Penyampaian informasi dan kinerja keuangan dan/atau non keuangan akhir tahun	Pelaporan Kinerja dan RUPS	Kuartal dan tahunan	Melaporkan kinerja keuangan dan non keuangan
	Kegiatan/aktivitas penting lainnya	Pelaporan kegiatan/aktivitas penting	Setiap ada kegiatan/aktivitas penting	Menyampaikan rencana dan laporan kegiatan/aktivitas penting
Regulator	Kepatuhan peraturan dan perundang-undangan	Penyampaian Rencana Bisnis Tahunan ("RBT") dan Laporan Realisasi	RBT 1 tahun sekali & Laporan realisasi 2 kali setahun	Menyusun RBT dan laporan-laporan yang diwajibkan Regulator sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
		Menyusun RAKB dan Laporan Berkelanjutan	1 tahun sekali	
		Penyampaian laporan lainnya yang diwajibkan Regulator sesuai jadwal yang telah ditentukan	Sesuai jadwal yang ditetapkan Regulator	
Pemasok/ Mitra Kerja	Hubungan bisnis yang saling menguntungkan	Sosialisasi kebijakan mengenai hubungan dengan pemasok	Minimal 1 tahun sekali	Menyusun perjanjian kerjasama dengan pemasok/mitra kerja dalam penyediaan barang/jasa.
	Proses pengadaan barang/jasa yang adil dan transparan			
Karyawan	Pemenuhan hak karyawan	Media Internal (<i>E-mail</i> , <i>Internal Memo</i> , <i>Internal Meeting</i>) dan Evaluasi Tahunan	Setiap ada informasi yang disampaikan kepada karyawan dan 1 tahun sekali untuk Evaluasi Tahunan	Sosialisasi kebijakan kepada karyawan
	Kesempatan pengembangan diri dan karir			
	Proses rekrutmen			
	Pengalaman bekerja yang berharga			
Komunitas dan/atau Masyarakat	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Pertemuan dengan komunitas/masyarakat dan Program Literasi Keuangan	Minimal 2x dalam 1 tahun	Memberikan literasi dan pengetahuan mengenai keuangan, produk/jasa Perusahaan dan berbagai info yang menarik dan produktif bagi masyarakat

5.5. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan KB

Secara internal penerapan KB sepanjang tahun 2025 telah berjalan seiring dengan kegiatan operasional Perusahaan. Pemahaman dan kesadaran (*awareness*) karyawan terus meningkat namun masih bisa dikembangkan lagi agar dapat memberikan dampak positif dalam penerapan KB.

Tantangan yang masih harus dipelajari dan ditindak lanjuti adalah peningkatan pengetahuan mengenai penerapan KB dan petunjuk teknis bagi perusahaan pembiayaan untuk menentukan kategori sektor usaha yang terkait penerapan KB. Peningkatan pengetahuan penerapan KB masih menjadi tugas penting mengingat masih minimnya lembaga atau institusi yang mempunyai kompetensi di bidang ini. APPI telah melakukan sesi pelatihan penerapan KB dan selanjutnya hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak SDM yang mengerti dan memahami pentingnya penerapan KB. Selanjutnya, setelah mendapatkan pengetahuan yang memadai, diperlukan adanya petunjuk teknis bagi perusahaan pembiayaan untuk penerapan KB dalam kegiatan usahanya. Terkait sektor usaha, salah satu sektor usaha yang diidentifikasi terkait penerapan KB adalah pembiayaan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“UMKM”). Sektor usaha mempunyai potensi sangat besar sepanjang ditangani secara memadai. Oleh karena itu, dalam manyasar pasar sektor usaha ini Perusahaan harus memastikan proses pembiayaan pada sektor UMKM ini dilakukan secara *prudent* dan memadai sehingga mendapatkan kualitas piutang pembiayaan tetap dalam sehat dan aman.

6. Kinerja berkelanjutan

6.1. Membangun budaya berkelanjutan

Dalam melaksanakan penerapan KB secara konsisten diperlukan adanya budaya keberlanjutan. Membangun budaya keberlanjutan tersebut harus dilakukan secara konsisten dan terarah. Struktur tata kelola perusahaan yang baik dan kompetensi SDM yang memadai diperlukan untuk membangun budaya keberlanjutan. Jadi, upaya terus menerus dalam perbaikan tata kelola perusahaan dan juga peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perlu dilakukan.

Perusahaan bukanlah perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksi, namun dalam melaksanakan kegiatan operasional tetap menggunakan energi listrik yang saat ini sebagian besar masih berasal dari energi fosil dan kertas yang berasal dari bahan baku pohon. Jadi, Perusahaan memandang bahwa pola kerja hemat energi listrik dan kertas akan memberikan dampak pada penurunan emisi GRK. Pola kerja hemat energi listrik dan kertas dapat dilakukan semua pihak dan merupakan kontribusi dan andil Perusahaan dalam penurunan emisi GRK.

6.2. Kinerja aspek ekonomi

Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan dari OJK per Desember 2025 mencatat bahwa realisasi total aset seluruh perusahaan pembiayaan mencapai sebesar Rp. 588.882 Miliar atau turun 0,01% dibanding realisasi total aset tahun 2024. Sedangkan pada periode yang sama, realisasi piutang pembiayaan (neto) sebesar Rp. 506.501 Miliar atau naik 0,61% dibandingkan realisasi piutang pembiayaan (neto) tahun 2024. Data ini menunjukkan perlambatan pertumbuhan piutang pembiayaan masih berlanjut namun demikian piutang pembiayaan industri perusahaan pembiayaan masih tetap dapat bertumbuh secara positif.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan senantiasa konsisten menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor ekonomi yang telah dipahami dan dilayani dengan baik, guna menjaga stabilitas bisnis di tengah dinamika pasar.

Realisasi Aset dan Piutang Pembiayaan

Perusahaan berhasil membukukan total aset sebesar Rp. 114.746 juta, meningkat 1,91% dibandingkan realisasi tahun 2024. Peningkatan aset ini mencerminkan resiliensi struktur keuangan Perusahaan. Di sisi lain, realisasi piutang pembiayaan (neto) tercatat sebesar Rp. 50.687 juta. Penurunan sebesar 13,71% ini merupakan dampak dari penurunan

pembiayaan produktif, sejalan dengan strategi kehati-hatian yang diterapkan Perusahaan.

Total Pendapatan dan Laba Komprehensif

Penurunan piutang pembiayaan tersebut secara proporsional memengaruhi realisasi total pendapatan yang tercatat sebesar Rp. 6.214 juta (turun 8,87% *yoy*) dan laba komprehensif sebesar Rp. 625 juta (turun 49,43% *yoy*). Meski terjadi kontraksi pada laba, Perusahaan memandang hal ini sebagai langkah konsolidasi untuk memastikan keberlanjutan usaha jangka panjang. Inisiatif ini sejalan dengan SDG No. 8 mengenai Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Kualitas Piutang Pembiayaan

Meskipun dihadapkan pada tantangan penurunan volume pembiayaan, Perusahaan tetap mampu menjaga kualitas portofolio secara luar biasa. Hal ini tercermin dari realisasi *Non-Performing Financing* (“NPF”) Neto sebesar 0,00%. Capaian ini membuktikan efektivitas sistem manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian yang menjadi landasan utama Perusahaan dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

6.3. Kinerja aspek sosial

Sebagai bagian dari komitmen penerapan KB, Perusahaan mempunyai kewajiban menyediakan dan menawarkan produk/jasa pembiayaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, Perusahaan juga berkomitmen untuk memberikan produk/jasa pembiayaan yang setara kepada seluruh Debitur/Calon debitur dan masyarakat. Kesetaraan Layanan tersebut diwujudkan dengan memberikan informasi secara memadai mengenai produk/jasa pembiayaan, fitur atau program kepada Debitur/calon debitur melalui media-media yang terjangkau bagi Debitur/Calon debitur dan masyarakat antara lain *Website*, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (“RIPLAY”), *E-mail*, brosur, atau media lainnya yang dapat diakses masyarakat. Inisiatif ini merupakan perwujudan nyata dukungan Perusahaan terhadap SDG No. 10 mengenai Berkurangnya Kesenjangan, melalui penyediaan akses informasi keuangan yang inklusif dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.

6.3.1. Ketenagakerjaan

Karyawan adalah salah satu pemangku kepentingan yang memegang peranan penting dalam kegiatan operasional Perusahaan sehingga perlu diatur suatu hubungan kerja yang baik dan sesuai ketentuan.

Jadi, Perusahaan akan selalu mendasarkan dan berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu implementasi bentuk kepatuhan yang dilakukan adalah tidak adanya rekrutmen pekerja anak dan juga berlakunya jam kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan wujud dukungan Perusahaan terhadap SDG No. 8 mengenai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, melalui perlindungan hak-hak tenaga kerja dan penyediaan lingkungan kerja yang aman.

Dalam hal kesempatan kerja dan pengembangan diri, Perusahaan selalu memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada siapapun yang memiliki kompetensi yang sesuai dan integritas yang tinggi, menjunjung etos kerja yang tinggi dan kejujuran.

Perusahaan telah memastikan semua hak karyawan dipenuhi secara memadai dengan memberikan remunerasi berdasarkan kebijakan perusahaan dan kinerja karyawan. Seluruh karyawan telah menerima remunerasi yang sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional (“UMR”). Perusahaan secara terus menerus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi karyawan agar dapat mencapai prestasi dan kinerja terbaik melalui pelatihan, seminar dan sertifikasi yang dilaksanakan oleh OJK, Regulator, APPI dan lembaga pelatihan yang mempunyai kompetensi baik. Seluruh karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensinya dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan. Upaya pengembangan kompetensi yang inklusif ini selaras dengan SDG No. 4 mengenai Pendidikan Berkualitas, guna memastikan seluruh karyawan memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai prestasi dan kinerja terbaik demi keberlanjutan Perusahaan

6.3.2. Masyarakat

Perusahaan memiliki 1 (satu) kantor pusat yang merangkap kantor operasional di Jakarta dengan cakupan area operasional di area Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur dan Lampung. Kegiatan usaha dan pelayanan Debitur/Calon debitur masih dapat dilaksanakan melalui jaringan kantor yang tersedia dan Perusahaan belum memiliki rencana untuk membuka Kantor Cabang (“KC”) ataupun Kantor Selain Kantor Cabang (“KSKC”).

Perusahaan terus berkomitmen berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Tahun

2025, kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali secara *offline* atau tatap muka secara langsung dengan partisipan yang terdiri dari siswa/wi Sekolah Menengah Atas Bintara di Depok, Jawa Barat dan mahasiswa/wi Politeknik Negeri Jakarta di Depok. Tema literasi keuangan yang disampaikan adalah “Menjadi Konsumen yang Cerdas dan Bijak Dalam Memanfaatkan Fasilitas Dana Pembiayaan”. Kegiatan ini merupakan kontribusi nyata Perusahaan terhadap SDG No. 4 mengenai Pendidikan Berkualitas, khususnya dalam meningkatkan literasi keuangan bagi generasi muda agar mampu mengelola sumber daya ekonomi secara bijak.

Partisipan yang hadir dan mengikuti kegiatan literasi keuangan sebanyak 132 orang. Kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapat respon yang positif dari pihak sekolah/kampus dan partisipan para siswa/wi karena mendapatkan wawasan baru mengenai industri keuangan khususnya perusahaan pembiayaan dan pengelolaan keuangan. Respon positif dan antusiasme dari pihak sekolah dan kampus menunjukkan pentingnya sinergi ini. Hal tersebut juga sejalan dengan semangat SDG No. 17 mengenai Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, di mana Perusahaan berkolaborasi dengan institusi pendidikan untuk memperluas akses pengetahuan mengenai industri keuangan kepada masyarakat luas.

Terkait pengaduan dari masyarakat mengenai aspek sosial dan lingkungan hidup, Perusahaan belum menyediakan mekanisme dan media khusus. Namun demikian, sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab kepada masyarakat, Perusahaan menyediakan media untuk menyalurkan pengaduan melalui saluran sebagai berikut:

Telepon	(021)29667879
E-mail	tufjkt@thetempogroup.com

Untuk saluran *whistleblowing*, Perusahaan juga telah menyediakan saluran sebagai berikut:

WA	085846343912
E-mail	tufjkt@thetempogroup.com Up. Anti Fraud

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Perusahaan juga menerima saran ataupun pengaduan dari Debitur/Calon debitur. Dan untuk menangani pengaduan tersebut, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan pedoman dan mekanisme penanganan pengaduan Debitur yang dituangkan dalam SOP Layanan Pengaduan Debitur.

6.4. Kinerja aspek lingkungan hidup

Kegiatan operasional yang dilakukan Perusahaan bukan merupakan kegiatan yang secara langsung membahayakan ataupun berpotensi merusak lingkungan hidup. Namun demikian, Perusahaan tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan operasionalnya sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Dalam melakukan kegiatan operasional, Perusahaan menggunakan energi listrik dan kertas. Energi listrik yang dikonsumsi sebagian besar masih berasal pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil dan kertas berasal dari bahan baku pohon. Oleh karena itu, Perusahaan terus mengupayakan kegiatan operasional yang ramah terhadap lingkungan hidup melalui pola kerja yang hemat energi listrik dan kertas.

Penggunaan energi listrik dalam kegiatan operasional Perusahaan difokuskan pada sistem penerangan ruangan dan perangkat elektronik guna mendukung kualitas pelayanan kepada Debitur/Calon Debitur.

Sepanjang tahun 2025, konsumsi energi listrik Perusahaan tercatat sebesar 10.915 Kwh, atau menunjukkan kenaikan sebesar 85,76% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini merupakan dampak dari program penataan dan optimalisasi ruang kerja (renovasi internal) di kantor pusat guna mendukung peningkatan kapasitas operasional dan kenyamanan layanan bagi Debitur. Penyesuaian luasan area kerja dan penambahan perangkat pendukung operasional di area baru tersebut menjadi faktor utama peningkatan konsumsi daya. Meskipun demikian, Perusahaan tetap berkomitmen pada semangat SDG No. 12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Perusahaan sedang melakukan proses transisi dan evaluasi teknis, termasuk rencana penerapan sistem zonasi lampu penerangan, guna memastikan penggunaan energi di ruang kerja yang baru tetap terkendali dan efisien.

Sebagai perbandingan, berikut ini realisasi jumlah energi listrik yang dikonsumsi dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Deskripsi	2025	2024	2023
1 Total energi listrik (Kwh)	10.915	5.876	6.764

Kertas merupakan material utama yang digunakan dalam mendukung administrasi operasional dan dokumentasi perjanjian pembiayaan dengan Debitur. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan mencatat realisasi penggunaan kertas sebesar 77.874 lembar kertas. Realisasi ini menunjukkan peningkatan 36,76% dibandingkan tahun 2024, yang sejalan dengan pertumbuhan jumlah kontrak pembiayaan baru dan aktivitas penataan dokumen administrasi di kantor pusat. Meskipun

terdapat kenaikan volume penggunaan, Perusahaan tetap berkomitmen pada prinsip SDG No. 12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab dengan memastikan bahwa setiap penggunaan kertas dilakukan untuk kebutuhan yang esensial.

Sebagai upaya mitigasi dan efisiensi material di masa mendatang, Perusahaan telah merencanakan beberapa langkah perbaikan melalui edukasi Karyawan dengan memberikan himbauan kepada seluruh karyawan untuk melakukan peninjauan ulang atau review dokumen secara digital sebelum memutuskan untuk mencetaknya.

7. Referensi Lampiran II POJK No.51/POJK.03/2017

No	Pengungkapan	Halaman
1	Penjelasan Strategi berkelanjutan	1
2	Ikhtisar Kinerja Berkelanjutan	
	a. Aspek Ekonomi	4
	b. Aspek Sosial	4
	c. Aspek Lingkungan hidup	4
3	Profil singkat Perusahaan	
	a. Visi Misi keberlanjutan	5
	b. Nama, Alamat, Nomer telepon, Alamat surat elektronik (<i>E-mail</i> dan <i>Website</i> Perusahaan	6
	c. Skala usaha Perusahaan	6
	d. Penjelasan singkat produk/jasa pembiayaan	7
	e. Keanggotaan dalam Badan/Asosiasi	7
4	Penjelasan Direksi	
	a. Kebijakan untuk merespon tantangan pemenuhan strategi keberlanjutan	8
	b. Penerapan keuangan berkelanjutan	9
	c. Strategi pencapaian target	10
5	Tata kelola berkelanjutan	
	a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan	11
	b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan	12
	c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala dan meninjau efektifitas proses manajemen risiko Perusahaan	13
	d. Penjelasan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dan pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan	15
	e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan	16
6	Kinerja berkelanjutan	
	a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya berkelanjutan di internal Perusahaan	17
	b. Uraian mengenai kinerja ekonomi 3 (tiga) tahun terakhir	17
	c. Kinerja sosial 3 (tiga) tahun terakhir	18
	d. Kinerja lingkungan hidup bagi Perusahaan	21

